

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis memilih lima penelitian dari berbagai sumber sebagai referensi penelitian terdahulu. Judul-judul yang ada dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik yang penulis angkat. Kelima penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama berjudul “*Assessing the quality of media reporting of suicide news in India against World Health Organization guidelines: A content analysis study of nine major newspapers in Tamil Nadu*” yang dikerjakan oleh Armstrong, Vijayakumar, Niederkrotenthaler, Jayaseelan, Kannan, Pirkis, dan Jorm pada 2018.

India memiliki tingkat bunuh diri yang tergolong tinggi di dunia dengan estimasi 250.000 kematian akibat bunuh diri per tahunnya. Media massa dilihat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat tentang bunuh diri sehingga angka bunuh diri dapat menurun. Namun, media di India kurang memberi perhatian kepada publik tentang peristiwa bunuh diri (Armstrong et al., 2018, p. 857) Itu mengapa Armstrong, Vijayakumar, Niederkrotenthaler, Jayaseelan, Kannan, Pirkis, dan Jorm melakukan penelitian dengan tujuan untuk menilai kualitas pemberitaan bunuh diri di Tamil Nadu, India terhadap pedoman yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tamil Nadu diketahui secara konsisten memiliki angka tertinggi kematian akibat bunuh diri di India, yaitu 15.777 kejadian tercatat pada 2015 (National Crime Records Bureau dalam Armstrong et al., 2018, p. 857). Penelitian Armstrong dkk. yang difokuskan ke satu negara bagian memungkinkan untuk melacak secara komprehensif perubahan dalam pelaporan media di Tamil Nadu setelah penelitian tersebut dilaksanakan.

Armstrong dkk. menggunakan metode analisis konten terhadap artikel yang melaporkan berita terkait bunuh diri di 9 dari 10 media berbahasa Inggris yang paling banyak dibaca di Tamil Nadu. Penelitian tersebut dilaksanakan sejak 1 Juni

hingga 31 Desember 2016 (7 bulan). 5 dari 9 media yang dianalisis tercatat sebagai bagian dari 20 surat kabar paling banyak beredar di Tamil Nadu. Jumlah artikel yang didapatkan dalam kurun waktu tujuh bulan ialah 1926 artikel dan dianalisis oleh tiga asisten periset terlatih yang juga bekerja sebagai psikolog. Armstrong dkk. mengecualikan artikel yang menyebutkan bunuh diri secara singkat (di bawah 50% dari artikel) dan bom bunuh diri sehingga tersisa hanya 1681 artikel untuk dianalisis secara statistik deskriptif.

Hasil penelitian Armstrong dkk. menemukan bahwa 92,7% artikel menyebutkan metode bunuh diri, 43,1% menjelaskan metode secara rinci, dan 8,2% menyebutkan lokasi publik sebagai lokasi kematian/percobaan bunuh diri. Judul berita dibuat semenarik mungkin dan ada 72,5% yang mengisinya dengan kata 'bunuh diri', 39,8% dengan mencantumkan metode bunuh diri, dan 39,3% peristiwa hidup yang sering kali dianggap sebagai faktor penyebab bunuh diri.

Sebesar 21,7% menyertai foto yang sensasional dan beberapa di antaranya dipublikasikan di halaman depan. Hampir tidak ada pelaporan yang berpotensi membantu. Hanya 3,6% artikel menyebutkan layanan pencegahan bunuh diri, 2,5% memberikan rincian kontak layanan dukungan.

Hasil analisis menunjukkan masih banyak artikel di Tamil Nadu yang tidak mendidik masyarakat tentang bunuh diri. Jarang ditemukan pendapat profesional kesehatan, temuan penelitian, data statistik, atau informasi tentang program pencegahan bunuh diri. Padahal, hal-hal tersebut merupakan cara yang dapat membantu mendidik masyarakat dan menginformasikan tentang bantu bagi mereka yang sedang mengalami krisis.

Kesimpulan dari penelitian Armstrong dkk. adalah bahwa secara umum pemberitaan bunuh diri di Tamil Nadu, India masih berkualitas rendah ketika dinilai berdasarkan pedoman dari WHO. Hal ini dapat menciptakan risiko bagi mereka yang kehilangan dan hilangnya kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang bunuh diri dan pencegahannya.

Kekurangan dari penelitian tersebut ialah media massa yang diambil hanya difokuskan kepada media massa. Dampak dari pemberitaan yang menyimpang di

Tamil Nadu juga belum dijelaskan dengan detail. Sebab itu, alangkah baiknya jika peneliatan berikutnya dapat menganalisis berita bunuh diri dari jenis media massa lainnya. Dampak pemberitaan juga menjadi penting untuk membantu pembaca lebih memahami apa yang terjadi jika pemberitaan tidak sesuai dengan pedoman.

Melalui penelitian Armstrong dkk., penulis dapat melihat gambaran bagaimana media di Asia memberitakan bunuh diri. Secara umum, ada bukti menunjukkan bagaimana media di Asia memberitakan bunuh diri secara eksplisit, tetapi belum ada gambaran secara spesifik bagaimana media di Indonesia memberitakannya. Hal ini akan mendorong penulis memahami gambaran umum pemberitaan bunuh diri di Indonesia sebelum akhirnya memfokuskan penelitian kepada bagaimana pedoman dibuat dan bagaimana proses perumusan pedoman pemberitaan bunuh diri memandang bunuh diri itu sendiri.

Penelitian kedua dilakukan oleh Cerel, Brown, Maple, Singleton, Venne, Moore, dan Flaherty dengan judul “*How Many People Are Exposed to Suicide? Not Six*”. Penelitian ini dipublikasikan pada 2019 lalu melalui The American Association of Suicidology.

Cerel dkk. melihat bahwa sudah lebih dari 30 tahun terakhir sebelum 2018 bahwa setiap bunuh diri, 6 orang akan terpapar. Perkiraan tersebut dibuat oleh Shneidman pada awal 1970-an, tetapi tidak pernah didasarkan pada bukti empiris (Cerel et al., 2019, p. 1). Lebih lanjut, Cerel dkk. (2019, p. 2) merujuk kepada penelitian yang melihat dampak orang yang terpapar bunuh diri dapat meningkatkan risiko depresi, membutuhkan perawatan psikiater, dan bahkan melakukan bunuh diri tiruan. Bahkan penelitian terkini (Maple et al. dalam Cerel et al., 2019, p. 2) menunjukkan bahwa pihak yang bukan kerabat pelaku bunuh diri dapat terpapar.

Penelitian ini menggunakan data dari survei angka acak dan mengambil 1.736 sampel orang dewasa di Amerika Serikat. Individu yang terekspos bunuh diri lebih mungkin melaporkan ide bunuh diri daripada yang tidak terekspos dengan persentase 9,0% vs 5,3% (Cerel et al., 2019, p. 2). Metode survei *random digit dialing* (RDD) digunakan kepada orang dewasa di The Commonwealth of

Kentucky sepanjang Juli 2012 hingga Juni 2013. Dengan persetujuan secara lisan, responden diwawancarai menggunakan beberapa langkah.

Pertama adalah mengenai paparan bunuh diri. Responden ditanyai tentang adakah kerabat yang meninggal karena bunuh diri, jumlah paparannya, dan mengidentifikasi kedekatan hubungan responden yang terpapar. Kedua ialah data demografi untuk mengetahui usia, ras, jenis kelamin, status perkawinan, status tempat tinggal, status sebagai orang tua, dan status veteran. Ketiga, populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh orang dewasa (di atas 18 tahun) di Commonwealth of Kentucky sebanyak 1.736 responden. Setidaknya ada 34 responden yang dikeluarkan karena tanggapannya hilang sehingga menyisakan 1.702 responden.

Peserta survei melaporkan ada 2.286 eksposur bunuh diri dari 98.399 orang per tahun. Dari angka tersebut, rata-rata tingkat kejadian paparan bunuh diri terhadap orang dewasa di Kentucky pada 2012 menjadi 0,0232 paparan per orang per tahun. Tingkat paparan 0,0232 digunakan untuk melipatgandakan paparan terhadap populasi orang dewasa di Amerika Serikat sebanyak 235.185.953 dan menghasilkan perkiraan 5.463.841 paparan bunuh diri pada 2012. Jika dibagi dengan angka kematian akibat bunuh diri di Amerika Serikat pada 2012 yang berjumlah 40.600 kematian, hasil yang didapatkan adalah sekitar 135 orang dewasa terpapar satu kematian akibat bunuh diri.

Celah dari penelitian ini adalah survei yang dilakukan hanya di satu negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Kentucky sehingga tidak dapat menggeneralisasi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Hal ini juga membuat 135 orang terpapar tidak bisa menggambarkan secara global paparan dari satu kejadian bunuh diri karena setidak tempat memiliki lingkungan, cara pandang, dan keadaan yang berbeda. Itu mengapa penelitian berikutnya diharapkan bisa melakukan hal serupa secara berkala di negara-negara lain untuk memberikan gambaran global tentang paparan bunuh diri.

Relevansi dari penelitian terdahulu kedua adalah penulis mendapatkan gambaran bahwa dampak dan paparan dari satu kejadian bunuh diri sangat

beragam. Angka 135 ditemukan berdasarkan hasil survei dan wawancara. Artinya, angka tersebut dapat menjadi lebih besar jika dilihat dari paparan pemberitaan satu kejadian bunuh diri. Ini mendorong penulis untuk lebih mendalami bagaimana informan memandang dampak-dampak dari satu kejadian bunuh diri untuk merampungkan pedoman pemberitaan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Laura M. Frey, Jason D. Hans, dan Julie Cerel pada 2016. Dengan judul “*Perceptions of Suicide Stigma: How Do Social Networks and Treatment Providers Compares?*”, penelitian ini melihat bahwa stigma mengacu kepada stereotipe negatif dan tidak akurat mengenai sekelompok orang yang mengarah kepada diskriminasi (Corrigan & Penn dalam Frey et al., 2016, p. 1).

Dalam konteks kesehatan mental, Frey, Hans, dan Cerel (2016, p. 1) menemukan bahwa stigma yang sering kali dipahami masyarakat adalah seseorang dengan gangguan mental berarti berbahaya dan harus ditakuti, kurang bertanggung jawab dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, serta kekanak-kanakan dan masih perlu dijaga oleh orang lain. Sedangkan bunuh diri memiliki stigma tersendiri yang dapat menyebabkan penolakan sosial, isolasi, atau dikucilkan. Stigma-stigma terhadap tersebut juga memandang orang yang meninggal karena bunuh diri sebagai seseorang yang arogan, pencari perhatian, menyedihkan, egois, dan lemah (Batterham dalam Frey et al., 2016, p. 1).

Latar belakang tersebut Frey, Hans, dan Cerel mengkaji stigma yang dialami mereka yang pernah mencoba untuk bunuh diri. Penelitian ini juga menganalisis sumber stigma, jenis stigma, dan efek stigma terhadap kesehatan mental untuk menarik setidaknya 5 hipotesis. Kelima hipotesis tersebut, yaitu (H1) individu dengan perilaku bunuh diri mendapatkan stigma lebih dari penyedia perawatan kesehatan non-mental dibandingkan dengan penyedia kesehatan mental, (H2) pengalaman mendapatkan stigma lebih mungkin dirasakan dari interaksi dengan masyarakat di jejaring sosial daripada penyedia perawatan, (H3) stigma yang dirasakan dari penyedia layanan kesehatan mental atau non-mental memiliki efek yang lebih besar pada stigma publik yang dirasakan daripada stigma diri, (H4)

stigma yang dirasakan dari jejaring sosial memiliki efek yang lebih besar pada stigma diri daripada stigma publik yang dirasakan, dan (H5) sumber stigma memprediksi tingkat keparahan gejala depresi pada individu dengan perilaku bunuh diri berdasarkan jenis stigma yang didapatkan.

Penelitian ini berjenis kuantitatif. Pengambilan sampel dan data dilakukan pada akhir 2013 hingga awal 2014. Responden dibagikan survei secara daring yang didistribusikan menggunakan Listservs dari American Association of Suicidology (AAS). Dan kategori responden adalah minimal berusia 18 tahun dan pernah mengalami pemikiran bunuh diri atau pernah melakukan percobaan bunuh diri. Melalui pengambilan sampel dan data tersebut, didapatkan 156 responden dengan rentang usia 18 hingga 77 tahun dan mayoritasnya (79%) adalah perempuan.

Metode yang digunakan untuk mengukur data adalah dengan membagi menjadi empat kategori. Pertama, responden akan digali mengenai latar belakang pengalaman mengenai bunuh diri. Kedua, mereka ditanyai tentang pengalaman mendapatkan stigma dari penyedia layanan kesehatan atau lingkungan sosial mengenai perilaku bunuh diri. Ketiga, penelitian ini menggunakan dua subskala dari Skala Stigma Aborsi Tingkat Individu untuk mengukur tingkat persepsi publik dan stigma tentang upaya bunuh diri. Terakhir, kuesioner Kesehatan Pasien 9 Item dari penelitian Spitzer dkk. digunakan untuk mengukur seberapa sering responden mengalami gejala gangguan depresi mayor selama dua pekan sebelumnya.

Frey, Hans, dan Cerel menguji H1 dan H2 dengan melakukan pengukuran berulang ANOVA satu arah untuk membandingkan prevalensi stigma yang dilakukan penyedia layanan kesehatan mental, non-mental, dan jejaring sosial. H3 dan H4 diuji dengan dua model regresi linear ganda untuk menentukan apakah sumber stigma secara statistik dapat memprediksi tingkat persepsi publik dan stigma diri. Terakhir, H5 diuji dengan regresi berganda hierarkis untuk memeriksa apakah menyertakan sumber dan jenis stigma dapat meningkatkan prediksi gejala depresi pada individu yang sebelumnya sudah memiliki perilaku bunuh diri dibandingkan dengan model jenis stigma.

Temuan dari penelitian Frey, Hans, dan Cerel adalah lebih dari setengah total responden, yaitu 58% telah mencoba bunuh diri dengan niat untuk mengakhiri hidup, 14% telah mencoba bunuh diri tanpa niat untuk mengakhiri hidup, 8% membeli bahan untuk mencoba bunuh diri tetapi tidak dilakukan, 7% menyampaikan ide kepada orang lain dengan maksud untuk mengakhiri hidup, 6% mengomunikasikan niat bunuh diri kepada orang lain tetapi tidak benar-benar ingin melakukannya, dan 6% memiliki ide tetapi tidak mengomunikasikannya kepada orang lain.

Temuan lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa stigma bunuh diri lebih mungkin datang dari jejaring sosial dan penyedia kesehatan non-mental. Psikoedukasi tambahan mengenai etiologi perilaku bunuh diri dan efek negatif dari stigma perlu disoroti untuk kedua kelompok tersebut. Upaya pencegahan bunuh diri juga secara khusus seharusnya tidak hanya menargetkan bagaimana mengenali indikator risiko bunuh diri, tetapi mendidik masyarakat tentang bagaimana merespons ketika seseorang mengungkapkan perilaku bunuh diri pada saat itu atau riwayat masa lampaunya.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah survei yang dilakukan hanya fokus pada persepsi stigma dan tidak menyertakan pertanyaan yang fokus pada jenis interaksi spesifik yang memberikan stigma. Reaksi kelompok yang memberikan stigma terhadap pengungkapan perilaku bunuh diri juga tidak diperdalam dan tidak melihat apakah interaksi tertentu dapat lebih berbahaya daripada yang lain. Sedangkan, relevansi untuk penulis adalah penelitian ini memberikan pandangan bahwa stigma berkemungkinan memiliki peran penting dalam pencegahan bunuh diri. Peran penting dari keberadaan stigma membantu penulis menggali lebih dalam bagaimana para informan memahami stigma bunuh diri dan apakah mereka memiliki stigma itu sendiri.

Penelitian keempat berjudul *“Increasing Adherence to Media Guidelines on Responsible Reporting on Suicide: Suggestions from Qualitative Interviews with German Journalists”* dikerjakan oleh Antonia Markiewitz, Florian Arendt, dan Sebastian Scherr pada 2020.

Markiewitz, Arendt, dan Scherr (2020, p. 1) melihat laporan bunuh diri yang bertanggung jawab memiliki peran penting dalam pencegahan bunuh diri. Dengan kata lain, media menjadi seperti pedang dengan dua mata pisau, bisa memberikan efek Werther dan efek Papageno. Di berbagai negara, pelaporan bunuh diri yang bertanggung jawab (*responsible reporting on suicide* atau RRS) sudah memiliki pedoman bahkan World Health Organization juga sudah merilis pedoman terkait pemberitaan bunuh diri sejak 2008. Markiewitz, Arendt, dan Scherr melihat bahwa pemberitaan yang mengikuti pedoman menjadi faktor penting dalam mencegah bunuh diri. Penelitian ini mewawancarai jurnalis di Jerman untuk melihat kesadaran mereka terkait aspek-aspek pemberitaan bunuh diri yang bertanggung jawab sesuai pedoman dari WHO. Wawancara tersebut untuk mengidentifikasi tingkat ketaatan terhadap pedoman dan penerapan dalam praktik jurnalis sehari-hari.

Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian, yaitu (RQ1) apa yang membuat bunuh diri layak diberitakan oleh jurnalis di Jerman? (RQ2) masalah apa yang dilihat jurnalis Jerman terkait dengan panduan dan materi kesadaran untuk pemberitaan bunuh diri yang bertanggung jawab? Dan (RQ3) bagaimana seharusnya pedoman media dan materi kesadaran untuk pemberitaan bunuh diri yang bertanggung jawab dirancang sehingga diterapkan jurnalis dalam peliputannya?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi-terstruktur kepada jurnalis-jurnalis di Jerman. 30 jurnalis (13 perempuan dan 17 laki-laki berusia 23—57 tahun) terpilih untuk ditanyain mengenai pemberitaan bunuh diri yang bertanggung jawab sesuai pedoman WHO. Wawancara dilakukan satu per satu secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang mendalam. 20 informan diketahui pernah memberitakan bunuh diri, 5 memiliki kontak tidak langsung dengan bunuh diri, dan 5 tidak pernah terpapar sama sekali tentang bunuh diri.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu keadaan dan motif jurnalis di balik pelaporan bunuh diri, faktor yang berkontribusi terhadap reaktansi pedoman media, dan strategi untuk menghindari

reaktansi. Secara umum, para jurnalis menjawab bahwa keadaan mendorong mereka untuk bekerja cepat, menyajikan informasi terkini, dan berkompetisi dengan media lain. Keadaan ini memberikan tekanan ekonomi karena mereka harus menyeimbangkan banyak topik dan artikel sekaligus. Pedoman pemberitaan juga dianggap mengganggu alur apa yang sudah biasa terjadi di dalam ruang redaksi.

Hal lainnya yang ditemukan adalah pedoman pemberitaan dianggap mengekang kebebasan berpendapat jurnalis. Para informan menyarankan memberikan rekomendasi daripada pedoman pemberitaan yang mengharuskan beberapa hal. Dapat disimpulkan juga bahwa ada kurangnya pengetahuan terkait bagaimana jurnalis memahami pedoman, terutama terkait pemberitaan bunuh diri non-selebritas.

Celah dan batasan yang ada dalam penelitian ini antara lain Markiewitz, Arendt, dan Scherr tidak dapat mengesampingkan bias keinginan sosial. Kedua, sampel yang terdiri dari 30 jurnalis tidak dapat digeneralisasikan. Ketiga, tidak ada uji mengenai apakah pelabelan terhadap pedoman memiliki pengaruh pada kredibilitas dan kepercayaan para jurnalis. Keempat, penelitian hanya difokuskan kepada pelaporan aktual saja, meski efek Werther dan Papageno dapat terjadi di media fiktif juga.

Penulis melihat relevansi bahwa penelitian ini memberikan pandangan tentang bagaimana persepsi jurnalis di Jerman terkait pemberitaan bunuh diri yang bertanggung jawab dan pedomannya. Persepsi terhadap bunuh diri dan pemberitaannya menjadi penting untuk digali dan dicari tahu guna mengembangkan pedoman. Penelitian ini akan menjadi acuan utama bagi penulis untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada para informan.

Penelitian kelima sebagai penelitian terdahulu terakhir diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Nazriatun Nisa, Muhammad Arifin, Muhammad Fauzan Nur, Shylvana Adella, dan Marthoenis yang dirilis pada 2020. Judul dari penelitian tersebut ialah “*Indonesian online newspaper reporting of suicidal behavior: Compliance with World Health Organization media guidelines*”.

Informasi umum dari WHO mengenai tingginya angka kematian akibat bunuh diri global (800.000/tahun) menyadarkan Nisa dkk. bahwa Indonesia belum memiliki data nasional terkait peristiwa tersebut. Tidak banyak studi dan data yang ditemukan Nisa dkk. pada saat itu. Namun, Nisa dkk. melihat bahwa pada awal 2019 Dewan Pers menginformasikan tentang draf awal pedoman pemberitaan terkait bunuh diri. Oleh karena itu, penelitian tersebut dibuat untuk meneliti kualitas media daring di Indonesia terkait pemberitaan bunuh diri berdasarkan pedoman milik WHO.

Berita-berita yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut dicari menggunakan mesin pencari Google dan fitur pencarian dari beberapa media. Kata kunci yang digunakan, antara lain ‘bunuh diri’, ‘melompat’, ‘gantungan diri’, dan ‘minum racun’. Dan durasi pencarian dibatasi dalam kurun waktu enam bulan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2018 dan difokuskan kepada berita dengan bahasa Indonesia. Berita terkait bom bunuh diri atau terorisme dikecualikan dalam penelitian tersebut.

Identifikasi dari setiap berita yang terkumpul melibatkan identitas korban bunuh diri, usia, gender, lokasi, metode bunuh diri, foto atau ilustrasi yang ditunjukkan, kejadian langsung, dampak terhadap keluarga, reaksi publik, surat wasiat, informasi bantuan terkait pencegahan bunuh diri. Data-data tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam perangkat lunak statistik PSPP untuk dianalisis.

Dalam rentang waktu enam bulan, setidaknya ada 548 artikel terkait bunuh diri dari 172 media daring. Temuan yang didapatkan ialah 99,45% berita menyebutkan metode bunuh diri secara eksplisit, baik tindak bunuh diri maupun percobaan bunuh diri. 76,46% berita menghubungkan gangguan jiwa sebagai penyebab bunuh diri, dan 82,12% menyebutkan nama korban bunuh diri.

Nisa dkk. menyimpulkan bahwa pemberitaan peristiwa bunuh diri dari media daring di Indonesia masih dilebih-lebihkan atau sensasional dan tidak sesuai dengan pedoman media untuk pencegahan bunuh diri dari WHO. Nisa dkk. melihat penelitian milik Niederkrotenthaler dkk. pada 2014 menjadi bukti bahwa media memiliki kesempatan untuk mengedukasi publik terkait bunuh diri dan hal ini disia-

siakan oleh media daring di Indonesia. Mengubah cara media daring di Indonesia memberitakan bunuh diri dinilai masih menjadi tantangan karena bunuh diri di Indonesia masih tabu (Nisa et al., 2020, p. 3).

Keterbatasan dari penelitian Nisa dkk. adalah penelitian tersebut hanya difokuskan kepada media cetak saja. Padahal pedoman pemberitaan diberlakukan untuk berbagai jenis media, tidak hanya salah satunya saja. Di sisi lain, relevansi penelitian milik Nisa dkk. dengan topik yang diangkat penulis ialah sudut pandang bagaimana kualitas media daring dalam memberitakan tindak dan upaya bunuh diri sebelum dirilisnya Dewan Pers. Karena sangat sedikit penelitian yang membahas topik ini, penelitian Nisa dkk. memberikan perspektif dan acuan terkait keadaan pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri di Indonesia.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori Etika

Etika merupakan cabang dari filsafat moral yang dimulai dari tulisan-tulisan Aristoteles, Epictetus, dan filsuf Yunani kuno lainnya. Filsuf moral modern melanjutkan konsep tersebut untuk memahami bagaimana manusia mengetahui benar dan salah serta “kebenaran” dan “kebaikan” yang harus didefinisikan (Plaisance, 2014, p. 7).

Etika hadir saat suatu keadaan yang berkaitan dengan sistem moral mengalami konflik atau disebut juga keadaan dilematis (Patterson & Wilkins, 2014, p. 4). Plaisance (2014, p. 8) melihat dilema tersebut akhirnya menciptakan pertanyaan etis karena hadir area abu-abu dan keruh tanpa adanya jawaban langsung yang “benar” serta sepenuhnya memuaskan. Melengkapi pandangan Plaisance, Margaret Walker (2007, p. 89), seorang filsuf moral mendefinisikan etika sebagai pencapaian pemahaman tentang moralitas yang memberikan pengertian tentang diri sendiri sebagai pengemban tanggung jawab dalam melakukan nilai-nilai yang diyakini.

Etika dan moral memiliki hubungan yang erat, tetapi tetap merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki penjelasannya masing-masing. Moralitas umumnya mengacu pada seperangkat keyakinan yang dianut seseorang untuk membantu memahami apa yang baik dan buruk di dunia (Plaisance, 2014, p. 8). Sedangkan etika berkaitan dengan perjuangan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika dihadapkan pada keadaan dilematis yang membuat nilai-nilai yang dipercaya berbenturan (Plaisance, 2014, p. 9). Dengan kata lain, moral berfokus pada kualitas kebaikan dan etika berfokus pada kebenaran tindakan tertentu.

Saat dihadapkan dengan keadaan dilematis, seseorang biasanya akan memilih untuk melakukan hal yang “benar”. Namun, “kebenaran” tersebut kadang justru akan merugikan seseorang lainnya. Etika tidak berbicara tentang menyenangkan semua pihak. Yang terpenting dari etika adalah kualitas penalaran dalam berpikir saat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Plaisance, 2014, p. 9).

2.2.1.1 Etika dalam Jurnalistik

Berkembangnya sistem informasi dan teknologi telah mengubah keadaan dalam praktik jurnalistik dan mendorong siapa pun untuk bisa memberitakan sesuatu (McBride & Rosenstiel, 2014, p. 2). Kebenaran yang menjadi nilai utama dalam jurnalistik menghadapi perubahan berdasarkan bagaimana orang-orang melihat dan mendefinisikan kebenaran itu sendiri (McBride & Rosenstiel, 2014, p. 4).

Society of Professional Journalists menerbitkan kode etik untuk jurnalis dengan empat poin utama, yaitu cari dan beritakan kebenaran, minimalisasi kerugian, bersikap independen, dan bertanggung jawab.

Lebih detailnya, Plaisance (2014, p. 48) menjelaskan pertama, jurnalis harus bisa jujur, adil, dan berani dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menginterpretasikan sebuah informasi. Kedua, jurnalis yang beretika memperlakukan sumber, subjek, dan kolega sebagai

manusia yang pantas dihormati. Ketiga, jurnalis harus bebas dari kepentingan apa pun kecuali hak publik mengetahui informasi. Terakhir, Jurnalis harus bertanggung jawab terhadap pembaca, pendengar, penonton, dan satu sama lain. Karena jika para profesional mengabaikan etika, yang terjadi adalah praktik jurnalistik memberikan kerugian dan melanggar hak-hak privasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemberitaan peristiwa bunuh diri yang mengekspos hal-hal detail dan dibuat sensasional merupakan pelanggaran etik. Salah satu fungsi Dewan Pers ialah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Perkembangan internet dan praktik media daring yang memberitakan peristiwa bunuh diri tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik menghambat edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan mental, kesehatan publik, dan pencegahan bunuh diri. Itu mengapa penting bagi penelitian ini untuk melihat bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi poin-poin dalam pedoman melihat dari sisi etika dalam jurnalistik.

2.2.2 Harm

Satu pelanggaran etika dalam peliputan dapat menciptakan beberapa kerugian, seperti kerugian terhadap reputasi jurnalis, narasumber, kepercayaan masyarakat, dan kepentingan ekonomi media yang bersangkutan. Mencegah kerugian jelas menjadi keyakinan bagi banyak orang. Namun, hanya mengucapkan komitmen untuk tidak menyakiti atau merugikan tidak banyak membantu. Pandangan W. D. Ross (dalam Plaisance, 2014, p. 124) mengenai bahaya dan kerugian ialah orang paling bermoral pun dapat melakukan kesalahan karena kurangnya informasi, miskomunikasi, salah persepsi, dan sebagainya.

Patrick Lee Plaisance (2014, p. 108) melihat bahwa wartawan harus mempertimbangkan kerugian dari berita yang tidak mempertimbangkan etika.

Menurutnya, tugas jurnalis profesional adalah menggunakan media untuk membuat berita yang bertanggung jawab dalam meminimalkan kerugian dan menghindari kerugian yang tidak diperlukan. Lebih jelasnya, Plaisance (2014, p. 125) menjelaskan bahwa bahaya/kerugian dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang secara eksplisit memundurkan minat seseorang, merendahkan martabat kemanusiaan, dan hal-hal merugikan yang mungkin tidak terjadi secara eksplisit.

Padahal, berbicara tentang pemberitaan yang meminimalisasi bahaya dan kerugian sudah masuk menjadi bagian dari kode etik. Dalam Kode Etik dari Society of Professional Journalists menyebutkan wartawan harus menunjukkan belas kasih kepada mereka yang terpengaruh oleh berita, lebih sensitif saat mencari atau menggunakan hasil liputan, mengingat bahwa bahan liputan dapat merugikan orang lain, masuk ke privasi orang lain saat ada kebutuhan publik yang genting untuk diberitakan, dan menyeimbangkan informasi. Di sisi lain, privasi juga menjadi hak mendasar yang harus dijaga.

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep *harm* melihat bahwa pemberitaan yang tidak beretika dan melanggar pedoman akan memberikan efek negatif terhadap berbagai pihak mulai dari korban, pihak terdekat korban, jurnalis, hingga perusahaan medianya. *Harm* dalam penelitian ini membantu penulis melihat bagaimana para informan memahami pemberitaan peristiwa bunuh diri yang menimbulkan *harm* dan apakah hal tersebut mendorong lahirnya pedoman.

2.2.3 Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri

Etika dalam pemberitaan bunuh diri digambarkan Louis Alvin Day (2006, p. 148) sebagai tugas media agar memberitakan kejadian tersebut dengan tetap menghormati privasi keluarga korban dan orang-orang di sekitarnya. Deni Elliott, Direktur Pusat Etika Praktis di Universitas Montana-Missoula (dalam Day, 2006, p. 148) berpendapat bahwa melaporkan kematian

akibat bunuh diri memang penting untuk mengingatkan masyarakat akan tingginya bunuh diri, tetapi catatan bunuh diri dan detail secara sembarangan adalah tindakan voyeurisme. Detail-detail tersebut adalah bagian dari privasi keluarga yang dapat membantu para profesional mencari tahu apa yang terjadi.

Menurut Royal Institute of British Architects (2005, p. 7), kode etik profesi merupakan acuan perilaku seseorang yang harus diikuti para pekerja profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu sebabnya kode etik dibuat untuk mengatur bagaimana keahlian tersebut digunakan dengan baik dan benar, terutama terkait situasi moral. Biasanya kode etik dibuat untuk membantu para profesional membuat penilaian dalam mengambil keputusan.

Profesi jurnalistik sendiri memiliki kode etik yang menyesuaikan dengan kesepakatan para pembuatnya di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, Kode Etika Jurnalistik sudah diresmikan sejak 2006 oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik tersebut disepakati oleh berbagai organisasi pers di Indonesia. Itu sebabnya proses pemberitaan haruslah mengikuti kode etik yang ditetapkan, seperti tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul yang tertulis dalam Pasal 4 (Pramisti, 2016, p. 10).

Bunuh diri bisa jadi salah satu topik yang dianggap sadis jika cara memberitakannya salah dan tidak sesuai dengan kode etik yang ada. Selain Kode Etik Jurnalistik, media juga bisa menggunakan pedoman pemberitaan peristiwa bunuh diri yang sudah dipublikasikan oleh WHO. Di sisi lain, pada 2019 Dewan Pers menerbitkan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 2/PERATURAN-DP/III/2019. Pedoman tersebut berisi 20 pasal yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri

PASAL	ISI
1	Wartawan mempertimbangkan secara seksama manfaat sebuah pemberitaan bunuh diri. Kalau pun berita dibuat, harus diarahkan kepada concern atas permasalahan yang dihadapi orang yang bunuh

	diri yang sekaligus adalah korban, bukan justru mengeksploitasi kasus tersebut sebagai berita yang sensasional.
2	Pemberitaan bunuh diri sebaiknya diletakkan atau diposisikan sebagai isu kesehatan jiwa dan bukan isu kriminalitas karena kasus bunuh diri bukan disebabkan faktor tunggal.
3	Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku.
4	Wartawan menghindari pemberitaan yang bermuatan stigma kepada orang yang bunuh diri ataupun orang yang mencoba melakukan bunuh diri.
5	Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
6	Wartawan menghindari penyebutan lokasi tertentu seperti jembatan, tebing, gedung tinggi yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri untuk menghindari aksi pengulangan.
7	Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang terdekat.
8	Dalam mempublikasikan atau menyiarkan berita yang menayangkan gambar, foto, suara atau video tentang kasus bunuh diri, wartawan perlu mempertimbangkan dampak imitasi atau peniruan (copycat suicide) dimana orang lain mendapat inspirasi dan melakukan aksi peniruan, terutama terkait tindakan bunuh diri yang dilakukan pesohor, artis, atau tokoh idola.
9	Wartawan menghindari ekspos gambar, foto, suara atau video korban bunuh diri maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan traumatik bagi masyarakat yang melihat atau menontonnya.
10	Wartawan pers penyiaran menghindari siaran langsung terhadap orang yang sedang berniat melakukan aksi bunuh diri.
11	Wartawan menghindari penyiaran secara detil modus dari aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan, jenis obat atau bahan kimia, maupun teknik yang digunakan pelaku. Termasuk tidak mengutip secara detil informasi yang berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian ataupun membaut sketsa dan bagan terkait hal tersebut.

12	Wartawan menghindari pengambilan bahan dari media sosial, baik foto, tulisan, suara maupun video, dari korban bunuh diri untuk membuat berita bunuh diri.
13	Wartawan menghindari berita ulangan terkait riwayat seseorang yang pernah melakukan upaya bunuh diri.
14	Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons "alami" atau "yang dapat dipahami" terhadap masalah, misalnya kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Wartawan tidak menguraikan perilaku bunuh diri sebagai tindakan tragis sekaligus heroik oleh seseorang yang memiliki segala sesuatu dalam hidup, seperti karier, posisi, kekayaan.
15	Pers menghindari eksploitasi pemberitaan kasus bunuh diri antara lain dengan cara mengulang-ulang pemberitaan kasus bunuh diri yang terjadi atau yang pernah terjadi.
16	Wartawan menggunakan secara hati-hati diksi serta istilah, dan menghindari penggambaran yang hiperbolik. Data statistik, harus diperlakukan hati-hati, dengan sumber yang jelas.
17	Pers menghindari pemuatan atau penayangan berita mengenai bunuh diri pada halaman depan, kecuali penulisan mendalam mengenai situasi kesehatan masyarakat dan bunuh diri hanya ditulis sebagai salah satu misal.
18	Wartawan diperbolehkan menulis atau menyiarkan berita lebih detail dengan fokus untuk pengungkapan kejahatan di balik kematian yang semula diduga sebagai kasus bunuh diri, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
19	Dalam hal pers atau wawancara memutuskan untuk memberitakan kasus bunuh diri, maka berita yang ada harus diikuti dengan panduan untuk mencegah pembaca, pendengar, atau pemirsa melakukan hal serupa seperti referensi kepada kelompok, alamat, dan nomer kontak lembaga dimana orang-orang yang mengalami keputusasaan dan berniat bunuh diri bisa memperoleh bantuan. Wartawan harus meminta pendapat para pakar yang relevan dan memiliki empati untuk pencegahan bunuh diri.
20	Pemberitaan tentang bunuh diri tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal gaib, takhyul atau mistis.

Pedoman lainnya, yaitu pedoman dari World Health Organization atau WHO digunakan penulis dalam penelitian ini untuk dibandingkan dengan pedoman milik Dewan Pers. Pada 1999 WHO merilis inisiatif global untuk pencegahan bunuh diri dan pada 2008 WHO bersama Asosiasi Internasional Pencegahan Bunuh Diri (IASP) memublikasikan pedoman pelaporan bunuh diri dan telah menerbitkan versi revisi pada 2017. WHO juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan profesional, akademisi, organisasi, pemerintah, pekerja di bidang hukum, keluarga, hingga komunitas untuk merumuskan pedoman tersebut.

Preventing suicide: a resource for media professionals Update 2017 dipilih karena WHO merupakan organisasi kesehatan dunia, yang berarti pedoman ini diberlakukan secara global juga. Selain itu, IASP merupakan organisasi terbesar di dunia untuk pencegahan bunuh diri. Terakhir, pedoman ini juga telah dicetak ke empat bahasa, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Korea, bahasa Jepang, dan Persia. Isi dari pedoman tersebut antara lain.

Tabel 2.2 Pedoman Pelaporan Bunuh Diri WHO

PASAL	ISI
1	<p><i>Take the opportunity to educate the public about suicide</i> <i>There are many misconceptions about suicide, and the media can play a role in dispelling various myths. The factors that lead an individual to suicide are usually multiple and complex, and should not be reported in a simplistic way. Suicide is never the result of a single factor or event. Mental illness is a strong predictor of suicide. Also, impulsiveness plays an important role. Mental disorders, such as depression and substance use disorders may influence a person's ability to cope with various life stressors and interpersonal conflicts. Cultural, genetic and socio-economic factors need to be taken into account as well. Almost always, it will be misleading to attribute a suicide to an individual event like exam failure or relationship breakdown, particularly in circumstances where the death has not yet been fully investigated. Suicide should certainly not be depicted as a means of coping with personal problems. The complexity of the act has</i></p>

	<p><i>a devastating impact for family members and friends, often leaving them searching for causes, wondering whether there had been signs they may have missed, mourning their loss, and feeling guilty, angry, stigmatized or abandoned. Reports of suicide that explore some of these impacts will further serve to educate the public.</i></p>
2	<p><i>Avoid language which sensationalizes or normalizes suicide, or presents it as a solution to problems</i></p> <p><i>Perhaps more than anyone, media professionals recognize the importance of language in conveying nuanced meanings. Language which conveys that suicide is a significant public health problem will serve to educate the community. Such language should not sensationalize suicide. Terms like ‘increasing rates’ should be used in preference to hyperbolic phrases like ‘suicide epidemic’, and caution should be exercised in using the word ‘suicide’ in headlines. Language that misinforms the public about suicide or normalizes it should be avoided. Out-of-context use of the word ‘suicide’ – e.g., ‘political suicide’ – may serve to desensitize the community to its gravity. Terms like ‘unsuccessful suicide’ imply that death is a desirable outcome and should not be used; alternative phrases such as ‘non-fatal suicide attempt’ are more accurate and less open to misinterpretation. The phrase ‘committed suicide’ should not be used because it implies criminality, thereby contributing to the stigma experienced by those who have lost a loved one to suicide and discouraging suicidal individuals from seeking help. Rather, one should refer to ‘completed suicide’. Suicide remains a criminal offence in some countries around the world.</i></p>
3	<p><i>Avoid prominent placement and undue repetition of stories about suicide</i></p> <p><i>Prominent placement and undue repetition of stories about suicide are more likely to lead to imitative behaviours than more subtle presentations. Newspaper stories about suicide should ideally be located on the inside pages, towards the bottom of the page, rather than on the front page or at the top of an inside page. Similarly, broadcast stories about suicide should be presented in the second or third break of television news, and further down the order of radio reports, rather than as the lead item. Consideration should be given to the extent to which the original story should be repeated or updated, and caution should be exercised in this regard.</i></p>

4	<p><i>Avoid explicit description of the method used in a completed or attempted suicide</i></p> <p><i>Detailed discussion of the method used in a given completed or attempted suicide should be avoided, because a step-by-step description may prompt vulnerable people to copy the act. For example, in reporting an overdose, it would be unwise to detail the nature, quantity or combination of drugs taken, or how they were procured. Particular caution should be exercised when the method of suicide is unusual. While this may appear to make the death more newsworthy, reporting the method may trigger other people to use this means.</i></p>
5	<p><i>Avoid providing detailed information about the site of a completed or attempted suicide</i></p> <p><i>Sometimes a location can develop a reputation as a ‘suicide site’ – e.g., a bridge, a tall building, a cliff or a railway station or crossing where fatal or non-fatal suicide attempts have occurred. Particular care should be taken by media professionals not to promote such locations as suicide sites by, for example, using sensationalist language to describe them or overplaying the number of incidents occurring at them.</i></p>
6	<p><i>Word headlines carefully</i></p> <p><i>Headlines are designed to attract the reader’s attention by giving the essence of the story in as few words as possible. Use of the word ‘suicide’ in the headline should be avoided, as should be explicit reference to the method or site of the suicide.</i></p>
7	<p><i>Exercise caution in using photographs or video footage</i></p> <p><i>Photographs or video footage of the scene of a given suicide should not be used, particularly if doing so makes the location or method clear to the reader or viewer. In addition, pictures of an individual who has died by suicide should not be used . If visual images are used, explicit permission must be given by family members. These images should not be prominently placed and should not glamorize the individual. Also, suicide notes should not be published.</i></p>
8	<p><i>Take particular care in reporting celebrity suicides</i></p> <p><i>Celebrity suicides are clearly newsworthy, and reporting them is often regarded as being in the public interest. However, reports of suicides by famous entertainers and political figures are particularly likely to influence the behaviour of vulnerable individuals, because they are revered by the community. Glorifying a celebrity’s death may suggest</i></p>

	<p><i>that society honours suicidal behaviour. For this reason, particular care should be taken in reporting celebrity suicides. Reports should not glamorize the suicide, should not describe the method in detail, and should comment on its impact on others. Additionally, care should be taken when reporting a celebrity death where no reason for the death is immediately available. Speculation about suicide on the part of the media can be harmful, and it is preferable to wait for the cause of death.</i></p>
9	<p>Show due consideration for people bereaved by suicide <i>A decision to interview someone who has been bereaved by suicide should not be taken lightly. People who have been bereaved by suicide are at heightened risk of suicide themselves. People who have experienced the death from suicide of a loved one are vulnerable and are working through grief and related issues. Their privacy should be respected at all times.</i></p>
10	<p>Provide information about where to seek help <i>Information about the options for seeking help should be included at the end of a story on suicide. The specific help sources will depend on the context, but might include general physicians, other health professionals, and community resources, as well as telephone helpline services. Listing available help sources will provide immediate avenues of support for individuals who are distressed or prompted to consider self-harm as a result of the story.</i></p>
11	<p>Recognize that media professionals themselves may be affected by stories about suicide <i>Preparing a story about an individual's suicide can resonate with media professionals' own experiences. The effect can be particularly pronounced in small, close-knit communities, where media professionals have strong local connections. There is an obligation on media organizations to ensure that necessary supports are in place, particularly for more junior staff. Such supports might include debriefing opportunities, mentoring arrangements and so on. Individual media professionals should not feel hesitant to seek help from within or outside the organization if they are adversely affected in any way.</i></p>

Markiewitz (2020, p. 9) dalam penelitian melihat setidaknya ada faktor-faktor mengapa jurnalis tidak memberitakan tindakan bunuh diri sesuai pedoman. Misalnya, tekanan ekonomi seperti memiliki dorongan penjualan jurnalistik. Dorongan penjualan tersebut hadir karena adanya kebutuhan untuk menyajikan berita terkini, cepat, dan berkompetisi dengan media lain. Selain itu, beberapa jurnalis dinilai menghadapi kendala waktu untuk menyeimbangkan banyak topik sekaligus dan hal ini dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya.

Hal lainnya yang menjadi catatan Markiewitz ialah terkadang jurnalis melihat pedoman sebagai pengekang kebebasan berpendapat mereka. Pedoman media dianggap kurang menjelaskan mengapa pencegahan bunuh diri melalui pemberitaan itu penting (Markiewitz et al., 2020, p. 10). Itu mengapa pedoman pemberitaan justru dianggap menjadi “pengganggu” dalam ruang redaksi mereka.

2.3 Alur Penelitian

Bagan 2.1 Alur Penelitian

